



## MODEL PENYELENGGARAAN SEKOLAH PRIBUMI SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KEBUDAYAAN UNTUK MASYARAKAT *SEDULUR SIKEP*

Misroh Sulaswari<sup>✉</sup>

Program Pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Januari 2013  
Disetujui Februari 2013  
Dipublikasikan Juni 2013

*Keywords:*  
*Indigenous School;*  
*Culture-Based Education;*  
*Sedulur sikep.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model penyelenggaraan sekolah pribumi sesuai dengan karakteristik masyarakat *Sedulur Sikep*. Sekolah pribumi adalah sekolah yang berlandaskan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, dengan membuat kelompok-kelompok belajar, waktu yang fleksibel, serta pemilihan materi pembelajaran dilakukan bersama, sesuai kebutuhan masyarakat *sedulur sikep*. Metode yang digunakan adalah *research and development* (RnD) dengan model pengembangan prosedural. Hasil yang diperoleh adalah *final draft* buku panduan penyelenggaraan sekolah pribumi. Dari hasil penelitian diperoleh data jumlah warga *Sedulur Sikep* yang tidak bersekolah formal sebanyak 60%. Hasil pengembangan diperoleh validitas buku panduan dari para pakar sebesar 3,59 dengan kriteria valid. Melalui proses inovasi diketahui hambatan diantaranya kurangnya guru, dana, dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan respon masyarakat terbagi menjadi dua yaitu dari kalangan muda memberi respon positif, dan dari kalangan orang tua menganggapi dengan pasif. Sebagai proses pemberdayaan, maka harus ditindaklanjuti melalui implementasi Sekolah Pribumi yang didukung dengan dana serta tenaga guru untuk melakukan pendampingan terus menerus.

### Abstract

*The purpose of this research was to develop a model of Indigenous School implementation that accordance with the characteristics of Sedulur Sikep. Indigenous School was a school that was based on customs and habits of the local community, by creating learning groups, flexible time, and the selection of learning materials carried along, according to Sedulur Sikep needs. The method used was a research and development (RnD) with procedural development model. The result was the final draft of the indigenous school implementation guide book. The results obtained that number of Sedulur Sikep who didn't join to formal school was 60%. The result was received from the guide line book validity from the expert was 3,59 with the valid criteria. Research and development was done through a process of innovation. It was aimed to identify the barriers such as lack of teachers, funding, and support from government. The public responses were divided into two that came from the young who given a positive response, and the old people who given passive respond. As the process of empowerment, it should be followed by the implementation of the Indigenous School which was supported by funding and mentoring of teachers to guide continuously.*

© 2013 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang 50233  
E-mail: [mim\\_kasroh@yahoo.co.id](mailto:mim_kasroh@yahoo.co.id)

## Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya adalah ke-mampuan dan kesanggupan melakukan perubahan melalui perencanaan dan pendekatan yang sistematis, sistemik, dan objektif sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara optimal, baik dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti sosial dan budaya. Pembangunan mengandung pengertian sebagai upaya perbaikan, meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian karena pelaksanaan pembangunan tidak selalu berimplikasi pada perbaikan. Kegagalan Ketidakberhasilan disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemahaman, pendekatan, dan tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai atau bertentangan dengan subjek pembangunan itu sendiri.

Secara konseptual, pembangunan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat tercapai secara optimal apabila para pelaku pembangunan memiliki pemahaman yang lengkap dan akurat tentang lingkungan fisik, sosial, budaya beserta seluruh ciri atau karakteristik masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembangunan KAT harus diawali melalui pelaksanaan pendidikan dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Pendidikan memungkinkan penanaman tata nilai dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pada akhirnya mampu meningkatkan ketahanan nasional Indonesia (Tarwotjo, 1985: 28).

Sementara, masyarakat *sedulur sikep* memiliki sikap yang berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya karena menolak untuk mengikuti pendidikan formal. Untuk itu diperlukan langkah khusus agar mereka mau mengikuti pendidikan. Adapun cara yang mungkin dapat ditempuh adalah pemberdayaan masyarakat melalui *participatory rural appraisal* atau *participatory learning and action*. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dapat ditingkatkan secara optimal tanpa ada pemaksaan. Di samping pendekatan di atas, peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan berbasis kebudayaan (*culture-based education*) melalui sekolah pribumi (*indigenous school*).

Konsep *culture-based education (CBE)* didapatkan dari hasil studi Powers (2006), *Kamehameha School* (2010) dan *Australian Government to Department of Education, Culture and Employment* (2004) yang melaporkan hasil memuaskan dari para siswa dengan guru-guru yang melakukan pendekatan CBE untuk siswa dari suku *Hawai* dan *Aborigin*.

William G. Demmert dalam presentasinya

di hadapan *The American Indian Teacher Education Conference* di *Northern Arizona University* pada tanggal 6 Juni 2009, memberikan pemahaman mengenai *Culture-Based Education* untuk pembelajaran siswa-siswa dari suku-suku asli di Amerika seperti Indian, Alaska dan Hawaii, yaitu penggunaan *indigenous language and indigenous education* serta dukungan dari komunitas adat. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan pendidikan yang berbasis pada sekolah pribumi (*indigenous school*) menjadi salah satu pilihan karena sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan masyarakatnya. Seiring dengan itu, sekolah pribumi mengalami perkembangan yang pesat.

Beberapa studi menyebut sekolah pribumi dengan istilah *tribal school*, yaitu model sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masyarakat akhirnya dapat menerima pendidikan formal melalui sekolah pribumi.

Sebenarnya, model pendidikan yang didasarkan pada karakteristik tertentu adalah hal yang biasa dalam pendidikan nonformal. Artinya, pelaksanaan pendidikan harus dilaksanakan secara fleksibel karena tidak ada satu model pendidikan pun yang dapat menjamin keberhasilan pengembangan sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan tujuan masing-masing individu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyelenggaraan pendidikan melalui sekolah pribumi merupakan salah satu alternatif pilihan yang patut dilaksanakan dan perlu dikembangkan variasinya. Apapun model sekolah yang dilaksanakan, maka persoalan dasar yang harus dijadikan dasar pertimbangan adalah tercapainya tujuan pendidikan dan meningkatnya peran serta masyarakat yang sebelumnya menolak pendidikan.

Masyarakat *sedulur sikep* merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan dengan warga masyarakat lain di Indonesia. Dengan demikian, sekolah pribumi bagi masyarakat *sedulur sikep* merupakan pilihan yang tepat karena sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang bersangkutan.

Pendek kata, sekolah pribumi memiliki peranan yang strategis dalam pemberdayaan KAT karena dapat diterima oleh seluruh warga masyarakatnya. Meskipun demikian, kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan sekolah pribumi bagi warga masyarakat *sedulur sikep* harus dipahami secara tepat dan akurat. Dengan demikian, sekolah pribumi dapat disempurnakan dan dijadikan model pemberdayaan masyarakat yang

memiliki karakteristik tertentu.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model penyelenggaraan sekolah pribumi bagi masyarakat *sedulur sikep*. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan respon yang muncul selama proses penelitian dan pengembangan model, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat *sedulur sikep*.

**Metode**

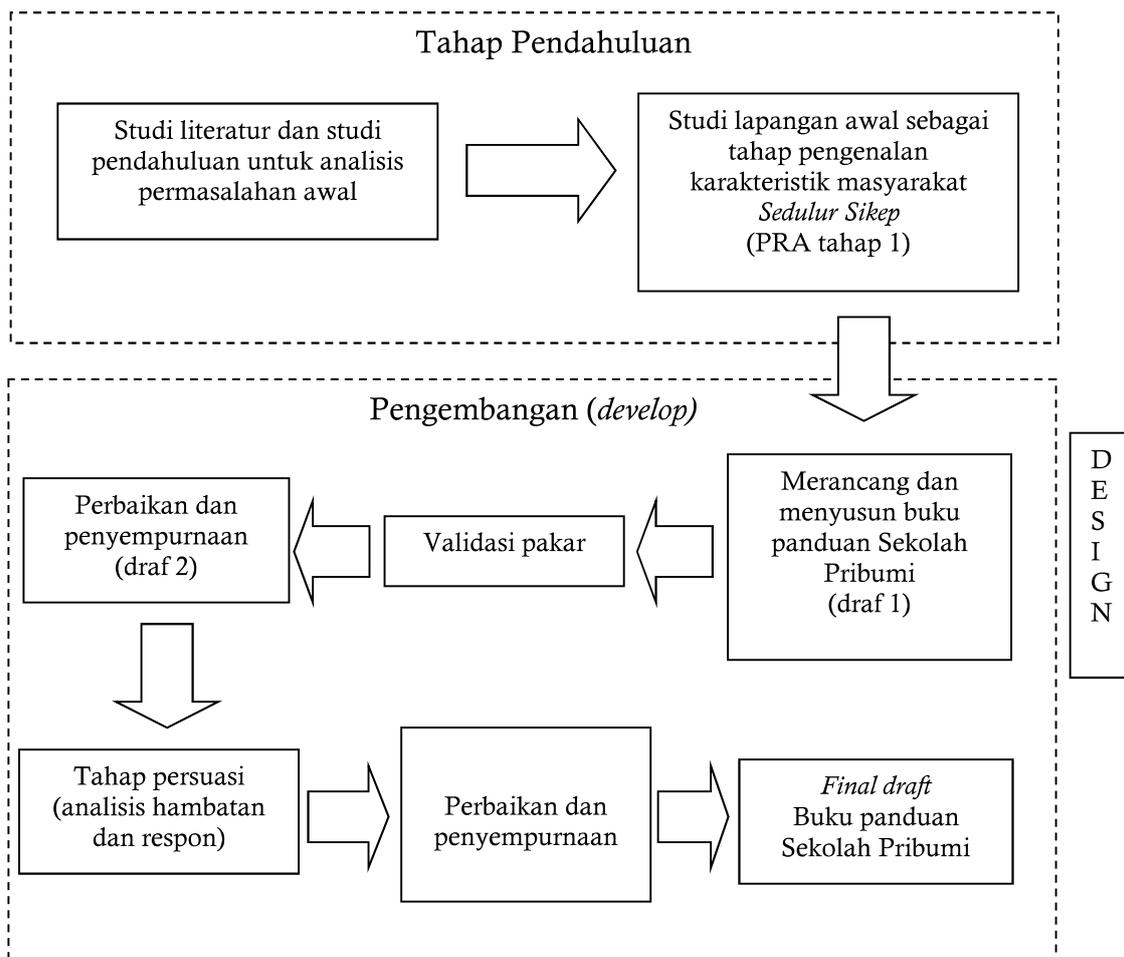
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*research and development*). Produk yang dihasilkan adalah model penyelenggaraan sekolah pribumi untuk masyarakat *sedulur sikep*. Model pengembangan yang digunakan adalah model prosedural yang mendeskripsikan langkah-langkah untuk menyelenggarakan sekolah pribumi. Adapun prosedur pengembangannya terangkum dalam Gambar 1.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat *sedulur sikep* yang tinggal di Desa Baturejo Keca-

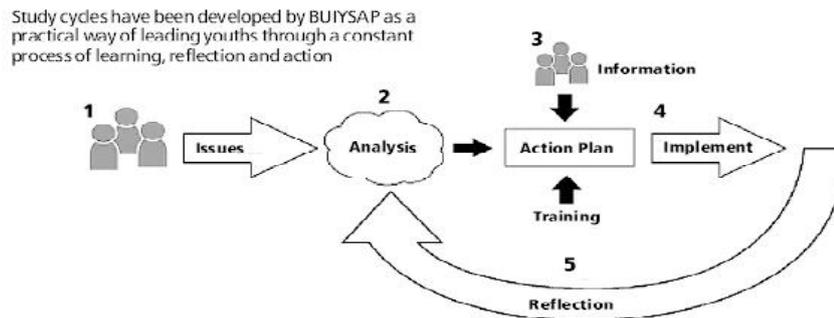
matan Sukolilo Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menguji objektivitas data dilakukan dengan review informan melalui *focus group discussion* (FGD).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Adapun model pemberdayaan masyarakat melalui sekolah pribumi merupakan daur ulang dari model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) seperti pada Gambar 2.

Visi dan tujuan metode PRA adalah perubahan sosial dan pemberdayaan (penguatan) masyarakat agar ketimpangan dapat diiadakan atau dikurangi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat agar menjadi lebih mampu untuk menganalisis keadaannya sendiri. Perubahan perilaku yang diharapkan metode PRA adalah perubahan perilaku yang membuat masyarakat kuat dan mandiri serta mengerti hak-hak dan kewajiban mereka (Djohani, ed, 1996: 28).



**Gambar 1.** Skema Prosedur Pengembangan Model Penyelenggaraan Sekolah Pribumi untuk Masyarakat *Sedulur Sikep*



**Gambar 2.** Daur Program PRA Adapted from BUIYSAP (sumber: Ndebele & Billing, 2011: 165)

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada masyarakat *sedulur sikep* yang bertempat tinggal di Dukuh Bombong-Bacem Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dapat diketahui bahwa masyarakat *sedulur sikep* berjumlah 729 jiwa. Ternyata, tidak semua warga masyarakat yang tinggal di Dukuh Bombong-Bacem adalah anggota masyarakat *sedulur sikep*.

Beberapa penduduk Dukuh Bombong-Bacem adalah pendatang yang sudah membaaur dengan warga masyarakat *sedulur sikep*. Para pendatang bukan kelompok masyarakat yang eksklusif sehingga mereka dapat memahami, menerima, menghormati, dan mengapresiasi budaya dan perilaku masyarakat *sedulur sikep*. Mereka dapat hidup saling berdampingan sehingga terjadi proses asimilasi budaya. Mereka saling memberi dan menerima pengaruh budaya dari masing-masing kelompok masyarakat sehingga terjadi percampuran antara warga masyarakat asli dan para pendatang.

Meskipun demikian, warga masyarakat *sedulur sikep* masih dapat diketahui secara jelas karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan warga pendatang, baik fisik maupun non-fisik. Bahkan, percampuran antara warga masyarakat *sedulur sikep* dan para pendatang tidak serta merta menyalpkan ciri-ciri masyarakat asli atau *sedulur sikep*. Berkaitan dengan kenyataan itu, terdapat sekitar 60% dari seluruh warga masyarakat yang tinggal di Dukuh Bombong-Bacem masih memegang teguh ajaran *sedulur sikep*. Dengan demikian, sikap dan perilaku warga masyarakat yang belum dapat menerima kehadiran lembaga pendidikan formal masih cukup besar.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dapat diketahui bahwa warga masyarakat *sedulur sikep* yang tidak sekolah relatif masih besar. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Warga *Sedulur Sikep* yang Tidak Bersekolah Formal

Kel. Usia (tahun)	Jenis kelamin		Jml	Persentase
	L	P		
6-19	49	55	104	22,32%
20-24	27	29	56	12,02%
25-29	23	31	54	11,59%
30-39	39	43	82	17,60%
40-49	34	36	70	15,02%
50-59	27	33	60	12,88%
≥ 60	17	23	40	8,58%
Jumlah	216	250	466	100%

Sumber data: Primer 2012

Data tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pengembangan model penyelenggaraan sekolah pribumi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan digunakan untuk menganalisis kebutuhan warga *Sedulur Sikep* terhadap pendidikan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan.

Tahap pengembangan diperoleh validitas instrumen buku panduan sekolah pribumi seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil Validasi Instrumen Buku Panduan Sekolah Pribumi (drafi 1)

Instrumen	Nilai Validasi
Buku Panduan Struktur dan Muatan	3,69
Materi Pembelajaran	3,47
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)	3,50
Lembar Penilaian	3,71
Rata-rata nilai validasi	3,59

Nilai tersebut menunjukkan bahwa penilaian dari para pakar memiliki kriteria valid, dan

dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Hasil validasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan masukan dan saran dari para pakar.

Penelitian selanjutnya merupakan pelaksanaan PRA tahap 2 untuk mengetahui tanggapan, pikiran, dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi Sekolah Pribumi. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan FGD yang sekaligus merupakan proses persuasi atas Sekolah Pribumi kepada masyarakat *Sedulur Sikep*. Proses persuasi merupakan tahap kedua dari proses inovasi yang dilakukan dalam rangka pembentukan sikap individu terhadap suatu inovasi yaitu Sekolah Pribumi.

Pada penelitian ini diperoleh informasi mengenai beberapa hal yang perlu penyesuaian Sekolah Pribumi dengan karakteristik masyarakat *Sedulur Sikep*. Penyesuaian tersebut di antaranya:

1. Kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan perbedaan usia sehingga peserta didik perlu dikelompokkan menurut usia yaitu kelompok dasar yang berusia 6 – 15 tahun dan kelompok lanjut yang berusia diatas 15 tahun.
2. Pelaksanaan belajar mengajar dengan bentuk klasikal atau tatap muka dilakukan menyesuaikan aktivitas masyarakat *Sedulur Sikep* sehingga cukup 1 atau 2 kali dalam satu minggu. Sementara satu kali tatap muka cukup 2 sampai 3 jam saja. Hal ini supaya tidak mengganggu aktivitas warga dalam bekerja di sawah dan sebagainya.

Di samping materi pertanian, perlu juga diberikan keterampilan-keterampilan lokal yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak melanggar nilai-nilai *Sedulur Sikep* misalnya keterampilan menjahit dan sebagainya. Pemilihan materi ini senantiasa berganti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga *Sedulur Sikep* yang juga berganti dari waktu ke waktu.

Selain itu, muncul masalah-masalah yang kemungkinan besar dapat menghambat terlaksananya Sekolah Pribumi, diantaranya:

1. Kurangnya pendamping sebagai guru Sekolah Pribumi yang dapat melakukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus.
2. Partisipasi yang kuat hanya terletak pada kalangan muda yang dikawal Mas Sumadi dan Gunretno. Kedua tokoh muda ini merupakan binaan Dinas Sosial Kabupaten Pati pada tahun 2005, sehingga pemikiran mereka sudah terbuka terhadap hal-hal baru selama tidak melanggar nilai-nilai *Sedulur*

*Sikep*.

3. Sementara partisipasi dari kalangan tua sangat sedikit, meskipun tidak menolak Sekolah Pribumi namun mereka bersikap pasif dan menyerahkan kepada masing-masing warga untuk mengikuti Sekolah Pribumi tersebut.
4. Masalah dana menjadi hambatan selanjutnya karena pelaksanaan Sekolah Pribumi membutuhkan dukungan dana untuk menyiapkan peralatan dan tenaga dari para guru.
5. Dukungan pemerintah khususnya pemerintah daerah pada masyarakat *Sedulur Sikep* dalam 2 tahun terakhir ini sudah berkurang, karena banyak kebijakan yang sering berujung dengan penolakan (kasus Pabrik Semen). Berdasarkan hasil dialog dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berkonsentrasi dengan upaya pembangunan pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng Utara, termasuk kawasan *Sedulur Sikep*, yang hingga kini masih terhambat karena penolakan dari berbagai pihak.

Penggalan informasi ini dilakukan supaya keberlanjutan program Sekolah Pribumi mendapatkan dukungan dan respon yang baik oleh masyarakat *Sedulur Sikep*. Oleh karena itu, semua aspek dan substansi dalam buku panduan harus menyesuaikan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat *Sedulur Sikep* sebagai masyarakat sasaran dalam upaya pemberdayaan atau *community development*.

## Pembahasan

### *Community Development melalui Learning and Action dalam Sekolah Pribumi*

Pengembangan model penyelenggaraan Sekolah Pribumi untuk masyarakat *Sedulur Sikep* dilakukan melalui serangkaian yang melibatkan aksi-aksi partisipatif. Upaya ini disebut dengan *community development* yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat *Sedulur Sikep* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang disarankan oleh PBB bahwa pentingnya *community development* sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan komunitas dalam ekonomi, sosial, dan kondisi budaya, serta menyatukan komunitas ke dalam kehidupan negara dan berkontribusi untuk kemajuan nasional (Holdcroft dalam Jones & Rolls (Eds), 1982: 207-231).

Cara yang digunakan oleh Sekolah Pri-

bumi adalah dengan melibatkan “orang dalam” sebagai guru yang akan melakukan pendampingan dan pembinaan secara terus menerus pada masyarakat *Sedulur Sikep*. Selain itu, pemilihan materi pembelajaran dilakukan bersama dengan warga *Sedulur Sikep* sebagai bagian dari strategi *Learning and Action*. Metode ini sering disebut pula dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Oleh karena itu pengembangan langkah-langkah dalam penyelenggaraan Sekolah Pribumi dilakukan melalui strategi *learning and action*.

Kegiatan *learning and action* warga dimulai dari proses identifikasi kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang dialami masyarakat *Sedulur Sikep*. Mereka diberi kebebasan berpendapat, mengungkapkan keinginan, dan bertukar pemikiran melalui wawancara dan FGD yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati. Dalam wawancara dan FGD juga diwacanakan program Sekolah Pribumi yang dikembangkan untuk warga *Sedulur Sikep*. Dari hasil wawancara dan FGD inilah langkah-langkah pengembangan mulai disusun. Melalui pendekatan *learning and action* tersebut upaya pemberdayaan terhadap masyarakat *Sedulur Sikep* dapat berjalan efektif karena masyarakat secara langsung terlibat dalam setiap kegiatan pengembangan program Sekolah Pribumi.

**Sekolah Pribumi sebagai Inovasi Pendidikan**

Sekolah Pribumi sebagai inovasi pendidikan menjadi dasar perubahan sosial budaya. Seperti yang dikatakan Bee dalam Joyomartono (2008:49) bahwa “tidak akan terjadi perubahan sosial budaya tanpa penerimaan inovasi”. Sebagai inovasi pendidikan, Sekolah Pribumi disusun secara sengaja dalam upaya pemberdayaan untuk masyarakat *Sedulur Sikep*. Unsur kesengajaan inilah yang membedakan inovasi dengan perubahan (Hamijoyo, 1974:8).

Sekolah Pribumi sebagai inovasi pendidi-

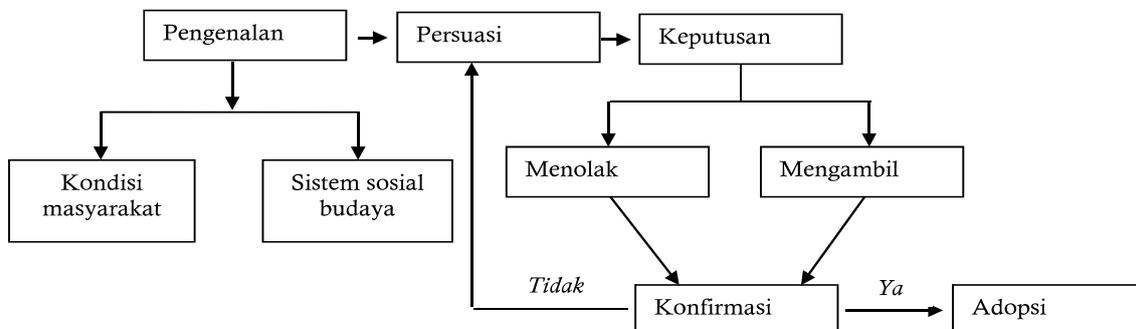
kan menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat *Sedulur Sikep* karena belum pernah dikembangkan program seperti ini sebelumnya. Proses inovasi Sekolah Pribumi dikembangkan dengan mengadaptasi tahapan proses inovasi dari Rogers & Soemaker (Joyomartono, 2008: 57-63) yang meliputi 4 tahap yaitu pengenalan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi, seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Namun karena keterbatasan waktu dan dana, maka penelitian ini hanya berakhir pada tahap konfirmasi berupa perbaikan dan penyempurnaan menjadi *final draft* berupa buku panduan Sekolah Pribumi untuk masyarakat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Tahap persuasi dan uji coba diharapkan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya dengan dukungan dari pemerintah karena program Sekolah Pribumi merupakan salah satu alternatif upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan pendekatan kultural.

**Penentu Keberhasilan Program Sekolah Pribumi**

Pada intinya penelitian dan pengembangan yang dilakukan ini merupakan langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat *Sedulur Sikep* sehingga keberhasilan program pengembangan bukan dilihat dari hasil pembelajaran melainkan respon positif dan penerimaan mereka terhadap program Sekolah Pribumi ini. Respon positif ditunjukkan khususnya dari kalangan muda saat wawancara dalam proses perencanaan dan penyusunan program Sekolah Pribumi untuk mereka. Buku panduan Sekolah Pribumi ini menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan, para guru, dan peneliti lain untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu implementasi, agar pendampingan tidak pernah putus untuk masyarakat *Sedulur Sikep*.

Dalam upaya *pemberdayaan* untuk masyarakat *Sedulur Sikep*, maka program pengemban-



**Gambar 3.** Proses Inovasi Sekolah Pribumi  
Modifikasi dari Rogers & Soemaker (Sulaswari, 2013)

gan ini baru 60% dikatakan berhasil. Selanjutnya harus ada upaya yang 40% berupa dana, tenaga, dan komitmen yang tinggi baik dari pemerintah maupun kalangan akademisi untuk menindaklanjuti inovasi tersebut dalam bentuk implementasi Sekolah Pribumi pada masyarakat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan model yang telah dilakukan beserta pembahasannya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, model penyelenggaraan Sekolah Pribumi yang dikembangkan berupa buku panduan yang terdiri dari 4 bab yaitu bentuk-bentuk pembelajaran Sekolah Pribumi dan proses penilaiannya, karakteristik guru dan peserta didik Sekolah Pribumi, Struktur dan Muatan Materi Pembelajaran, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh para validator diperoleh nilai validasi sebesar 3,59 dengan kriteria valid.

*Kedua*, hambatan-hambatan dalam program Sekolah Pribumi yang telah diidentifikasi selama proses inovasi diantaranya adalah kurangnya guru sebagai pendamping program Sekolah Pribumi, hambatan waktu dan dana yang terbatas, serta dukungan dari pemerintah yang masih kurang.

*Ketiga*, respon masyarakat *Sedulur Sikep* terbagi menjadi dua yaitu dari kalangan muda yang memberikan tanggapan positif terhadap keberlanjutan program Sekolah Pribumi, sementara kalangan tua menanggapi program dengan pasif dan diserahkan kepada masing-masing individu selama tidak melanggar cara hidup *Sedulur Sikep*.

## Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, perlunya dukungan yang besar mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat dalam penyediaan dana dan rekrutmen tenaga sukarela untuk melakukan pembinaan pada masyarakat *Sedulur Sikep*.

*Kedua*, perlunya tindak lanjut dari penelitian dan pengembangan Sekolah Pribumi ini yaitu berupa implementasi baik dari pemerintah maupun dari kalangan peneliti dan akademisi.

*Ketiga*, tindakan persuasi harus terus dilakukan melalui pendekatan partisipasi dengan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan penerimaan dari suatu perubahan khususnya melalui Sekolah Pribumi.

*Keempat*, perlunya dukungan dari masyarakat sekitar di luar *Sedulur Sikep* untuk melakukan pendekatan dan mengajak ke arah kemajuan.

## Daftar Pustaka

- Demmert, W. G. 2011. "What is Culture-Based Education? Understanding Pedagogy and Curriculum". Dalam Reynner, J., Gilbert, W.S., dan Lockard, L (Eds). *Honouring Our Heritage: Culturally Appropriate Approaches to Indigenous Education*. Flagstaff: Northern Arizona University. Hal. 1-9.
- Departmental Directive. 2004. *Aboriginal Language and Culture-Based Education*. 1 September. Hal 1-16.
- Djohani, R. (Ed). 1996. *Berbuat Bersama Berperan Sertara; Acuan Pengembangan Participatory Rural Appraisal*. Bandung: Studio Driya Media
- Hamijoyo, S.S. "Inovasi Pendidikan (Meninjau Beberapa Kerangka Analisa untuk Penelitian dan Pelaksanaannya)". *Pidato Pengukuhan*. IKIP Bandung tanggal 14 Maret 1974.
- Hermes, M. 2000. "The Scientific Method, Nintendo, and Eagle Feathers: Rethinking The Meaning of 'Culture-Based Education' Curriculum at an Ojibwe Tribal School". *International Journal of Qualitative Studies in Education*, Volume 13 No. 4. Hal 387-400.
- Hunter, B. H. 2010. *Pathways for Indigenous School Leavers to Undertake Training or Gain Employment*. Australian Government, Australian Institute of Health and Welfare, Australian Institute of Family Studies.
- Joyomartono, M. 2008. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Semarang: UNNES Press
- Kana'iaupuni, S., Ledward, B., dan Jensen, U. 2010. *Culture-Based Education and Its Relationship to Student Outcomes*. Honolulu: Kamehameha Schools Research & Evaluation Division.
- Mc Gee, R., Greenhalf, J., & Ashley, H (Eds). 2011. "Young Citizens: Youth and Participatory Governance in Africa". *Participatory Learning and Action*, Issue 64. London: IIED
- Powers, K. M. 2006. "An Exploratory Study of Cultural Identity and Culture-Based Educational Programs for Urban American Indian Students". *SAGE Journals Online Urban Education*, Volume 41 No. 20. Hal 20-49.
- Tarwotjo. 1985. *Pengantar Antropologi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- Jones, G. E. & Rolls, M. J (Eds). 1982. *Progress in Rural Extension and Community Development*. John Wiley & Sons. Volume 1.